

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Nilai

Menurut Winarno (2006), nilai didefinisikan sebagai sesuatu yang bermakna, dapat diukur, dan meningkatkan standar hidup manusia. Apapun yang bernilai menunjukkan bahwa hal tersebut bermanfaat atau menguntungkan bagi keberadaan manusia. Nilai adalah konsep abstrak dalam psikologi manusia yang menggambarkan apa yang baik dan salah. Nilai tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga berlaku untuk semua manusia. Nilai tampil adalah sesuatu yang dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh setiap orang; sebagai hasilnya, nilai dapat dikomunikasikan dengan orang lain.

Sukarno (2013) berpendapat bahwa nilai memiliki jumlah yang banyak dan berbagai macam. Beberapa nilai yang disebutkan di atas dapat dikelompokkan. Nilai tersebut juga mempunyai tahapan. Terdapat 3 (tiga) macam nilai, yaitu sebagai berikut.

1. Nilai material, suatu hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia.
2. Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan.

3. Nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 (empat) macam diantaranya nilai kebenaran, nilai estetika, nilai kebaikan, dan nilai religius.

Nilai memiliki sifat abstrak, yang mirip dengan ide atau dengan kata lain tidak dapat ditangkap oleh indra, melainkan sebuah objek yang memiliki nilai tertentu. Nilai juga mengandung harapan akan hasil yang diinginkan. Misalnya, nilai kesederhanaan dan keadilan. Orang dalam kehidupan sehari-hari mengharapkan untuk mendapatkan kesuksesan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Oleh karena itu, kontrak yang mengikat secara hukum merupakan persyaratan yang diterapkan pada batas bawah (Winarno, 2007).

Nilai mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai suatu klasifikasi. Dalam kenyataannya, nilai-nilai ini berbeda satu sama lain dalam hal tinggi dan rendahnya, dan juga berbeda dalam hal luhur dan tingginya (Sukarno, 2013). Dalam filosofi Pancasila, juga dinyatakan bahwa ada tiga (3) tingkat penalaran: fundamental, instrumental, dan praktis. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai Pancasila didasarkan pada etika atau moralitas. Hukum-hukum esensial Pancasila terkandung dalam tingkatan nilainya. Kutipan ini mengacu pada kutipan berikut, yang merupakan kutipan instrumental. Prinsip-prinsip dasar mengatur semua kegiatan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Prinsip-prinsip dasar bersifat sederhana dan lugas (Winarno, 2007).

1. Pengertian Demokrasi

Tujuan dari demokrasi adalah untuk mengenalkan kita pada seperangkat masalah dasar yang klasik, namun tetap aktual. Diklasifikasikan sebagai klasik karena masalah demokrasi telah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafat, seperti dalam kasus Yunani Kuno, dan telah didiskusikan di Athena Polandia. Pada dasarnya, karena prinsip-prinsip demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesejahteraan manusia tentang apa yang disebut sebagai kehidupan yang baik dan bagaimana hal itu akan terpengaruh ketika individu menjadi subjek di bawah negara dan kadang-kadang menjadi objek kerja. Sebagai hasil dari pergeseran sejarah ini, demokrasi kini menjadi alat yang dapat digunakan oleh semua bangsa dan masyarakat untuk pembangunan, termasuk Indonesia di era reformasi ini (Suyahmo, 2015).

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan yang jika digabungkan berarti suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Dengan adanya kedaulatan rakyat dalam pemerintahan berarti semua ikut bertanggung jawab dalam pembangunan negara (Suyahmo, 2015).

Proses demokrasi membutuhkan partisipasi aktif rakyat dalam perumusan kebijakan. Rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat diperhitungkan ketika pemerintah mengambil keputusan. Setiap keputusan pemerintah

merupakan pernyataan kebutuhan rakyat atau representasi kepentingan mereka. Demokrasi memiliki sejumlah karakteristik penting. Demokrasi menganggap kelangsungan hidup umat manusia sebagai tujuan utama dan masyarakat harus beradaptasi untuk mengurangi laju kepunahan manusia. Selain itu, konsentrasi kekuasaan, atau kekuasaan, terletak di daerah yang dikenal sebagai pertumbuhan berlebih (Mufti dan Naafisah, 2013).

Fondasi politik demokratis di setiap negara terkait dengan dua hal: pembentukan (struktur) dan praktik (budaya) demokrasi. Analisis Gabriel Almond dan Sidney Verba (dalam Winarno, 2007:110-111) mengindikasikan bahwa demokrasi akan terwujud jika ada kematangan budaya politik. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat yang demokratis mengimplikasikan terciptanya kematangan antara struktur demokrasi dan budaya demokrasi. Masyarakat yang demokratis akan terwujud apabila terdapat lembaga-lembaga yang demokratis di negara tersebut dan pemerintahan yang demokratis pula.

Oleh karena itu, demokrasi memerlukan lebih dari sekedar institusi, hukum, peraturan, atau organisasi nasional lainnya. Sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakat yang sejati memerlukan para demokrat. Adalah sebuah fakta bahwa demokrasi memerlukan warga negara yang mendukung dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Kondisi ini memerlukan waktu yang panjang, pelan-pelan dan perlahan-lahan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan untuk memberdayakan massa demokratis agar dapat melakukan tindakan yang berarti. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya

adalah sosialisasi yang perlu dilakukan agar nilai-nilai demokrasi dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Winarno, hal. 111.

2. Nilai-nilai Demokrasi

Menurut Nashir (dalam Sukarno 2013:80-86), prinsip-prinsip demokrasi adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan yang demokratis. Atas dasar prinsip-prinsip ini, pemerintahan yang demokratis dapat dibentuk. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip demokrasi tersebut tidak dilaksanakan, maka akan sulit untuk mencapai tingkat pemerintahan yang demokratis. Berikut adalah beberapa ayat yang dimaksud:

1) Kebebasan Berpendapat

Menurut Sukarno (2013), dasar mengemukakan pendapat merupakan hak bagi warga negara biasa yang harus dijamin dengan sistem politik yang demokratis. Hal ini diperlukan karena kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang akhirnya muncul pada era pemerintahan saat ini. Hak menyampaikan pendapat ini harus dijamin oleh pemerintah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk kewajiban negara dalam melindungi warga negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah maupun swasta. Kecepatan dan keefektifan pemerintah dalam memberikan bantuan juga semakin

meningkat, begitu pula dengan kualitas demokrasi pemerintah (Sukarno, 2013: 80).

2) Kebebasan Berkelompok

Sukarno (2013:81) berpendapat bahwa kemampuan penduduk secara keseluruhan untuk membentuk organisasi merupakan komponen fundamental demokrasi yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama antara anggota kelompok diperlukan. Ini berarti diperlukan organisasi-organisasi seperti partai politik, organisasi mahasiswa, organisasi belajar, organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi buruh, dan lain-lain. Naluri dasar manusia yang tidak mungkin diingkari sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (zoon politicon) adalah kebutuhan berkelompok. Di era modern, kebutuhan berkelompok dalam hal ini menjadi semakin mendesak karena semakin kompleksnya dinamika sosial yang muncul di masyarakat. Akibatnya, organisasi seringkali dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan konflik, seperti yang dilakukan oleh organisasi sosial seperti NU dan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap kaum muda, terlantar, kebodohan, kemiskinan, dan isu-isu terkait lainnya.

3) Kebebasan Berpartisipasi

Sukarno (2013:81-82) mencatat bahwa partisipasi merupakan hasil pengembangan dari pendapat dan perilaku kelompok. Jenis partisipasi

yang pertama adalah membiasakan masyarakat dengan keadaan umum, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, pemberian suara dalam pemilihan umum dianggap sebagai prasyarat partisipasi politik. Dalam masyarakat yang demokratis, tidak perlu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup bebas dari korupsi.

4) Kesetaraan Antar Warga

Menurut Sukarno (2013:82), kesetaraan adalah salah satu prinsip utama yang diperlukan untuk pembangunan demokrasi di Indonesia. Hal ini merupakan contoh pengalaman bersama bagi semua warga negara. Setiap anggota bangsa mendapatkan tempat tanpa harus mempertimbangkan agama, ras, atau jenis kelamin. Hal ini diperlukan karena penduduk Indonesia yang heterogen.

5) Kesetaraan Gender

Menurut Sukarno (2013:83), kesetaraan gender didefinisikan sebagai kemampuan laki-laki dan perempuan untuk memiliki kedudukan hukum yang sama dan memiliki karakteristik yang sama sebagai kelas sosial (political zoom). Baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan bidang-bidang terkait lainnya. Untuk itu, demokrasi yang netral gender akan berdampak negatif terhadap kohesi sosial.

6) Kedaulatan Rakyat

Sukarno (2013:84) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pemerintah itu sendiri adalah produk dari rakyat dan mengabdikan kepada rakyat. Pemahaman akan ketergantungan pemerintah terhadap rakyat merupakan hasil dari konsep akuntabilitas. Politik yang akuntabel adalah jenis politik yang menegaskan bahwa anggotanya adalah anggota masyarakat.

7) Rasa Percaya (*Trust*)

Sukarno (2013: 84) menegaskan bahwa pemahaman tentang hubungan antara agama, masyarakat, dan negara dari masyarakat sangat penting bagi perkembangan demokrasi. Para pelaku demokrasi akan enggan bertindak jika persepsi masyarakat tidak positif, sebaliknya perasaan marah, tidak percaya, dendam, dan apatis akan menyebabkan keretakan permanen di antara masyarakat.

8) Kerja Sama

Sukarno (2013: 85) menegaskan bahwa kerja sama tim sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Kerja sama adalah apabila individu atau kelompok bersedia mengorbankan sebagian dari apa yang dicapai dalam kerja sama tersebut. Bekerja sama bukan berarti tidak akan ada perbedaan upah antara individu

atau kelompok, yang perlu diakui. Jika ada perbedaan di antara anggota kelompok, kemungkinan demokrasi akan berkurang.

3. Suara Demokrasi

Tujuan dari program Merdeka dari Profil Peserta Didik Pancasila adalah untuk mengembangkan karakter yang akan memastikan munculnya sumber daya manusia (SDM) yang lebih kuat dengan karakteristik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, proyek, dan kegiatan ekstrakurikuler. Proyek Penguatan Profil Peserta Didik Pancasila (P5) menawarkan kesempatan kepada para peserta penelitian untuk melakukan penelitian, memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari lingkungan, dan bekerja dengan jadwal yang fleksibel untuk menghasilkan produk atau jasa.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menentukan tema dalam kegiatan proyek untuk diimplementasikan dalam satuan pendidikan yang dapat berubah dalam setiap tahunnya. Terdapat 7 (tujuh) tema yang sudah ditetapkan, Adapun 7 (tujuh) tema untuk tahun ajaran 2023/2024 dalam tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai berikut: (1) gaya hidup berkelanjutan, (2) kearifan lokal, (3) bhinneka tunggal ika, (4) bangunlah jiwa raganya, (5) suara demokrasi, (6) rekayasa dan teknologi, (7) kewirausahaan. Pada tema tersebut, satuan pendidikan diwajibkan memilih 3 (tiga) tema untuk diimplementasikan pada setiap semester dalam setiap tahunnya.

Salah satu tema yang diambil oleh SMK St. Bonaventura 1 Madiun adalah Suara Demokrasi. Suara demokrasi dalam kegiatan pelaksanaan P5 dimaksudkan untuk mendidik siswa agar dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur organisasi sekolah maupun di masyarakat umum atau dunia kerja.

4. Pemilihan Ketua OSIS

1) Sistem Pemilihan Umum

Menurut Budiardjo (2008: 461), masyarakat umum di sebagian besar negara demokratis bekerja untuk mempertahankan dan memperkuat demokrasi. Dinyatakan bahwa hasil-hasil umum yang ditentukan oleh gaya hidup yang ditandai oleh rasa ekspresi diri yang kuat dan ketenangan hampir pasti merupakan hasil dari partisipasi dan aspirasi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa masyarakat umum tidak hanya terdiri dari sejumlah kecil individu dan harus diperluas dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang lebih terlibat, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menjadi sukarelawan, dll.

2) Pemilihan Ketua OSIS

Menurut Hanun dan Setyowati (2013:539-540), program pemilihan pengurus OSIS dilaksanakan oleh pengurus OSIS sendiri. Pemilihan Ketua OSIS di SMK St. Bonaventura 1 Madiun ini dirancang sedemikian rupa sehingga hampir mirip dengan Pemilu pada tatanan pemerintahan. Sehingga siswa di sekolah tersebut dapat memahami pemilihan ketua

OSIS ini sebagai suatu sarana berdemokrasi di lingkungan sekolah dan dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai nilai-nilai demokrasi dalam suatu kegiatan pemilihan ketua OSIS tersebut.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

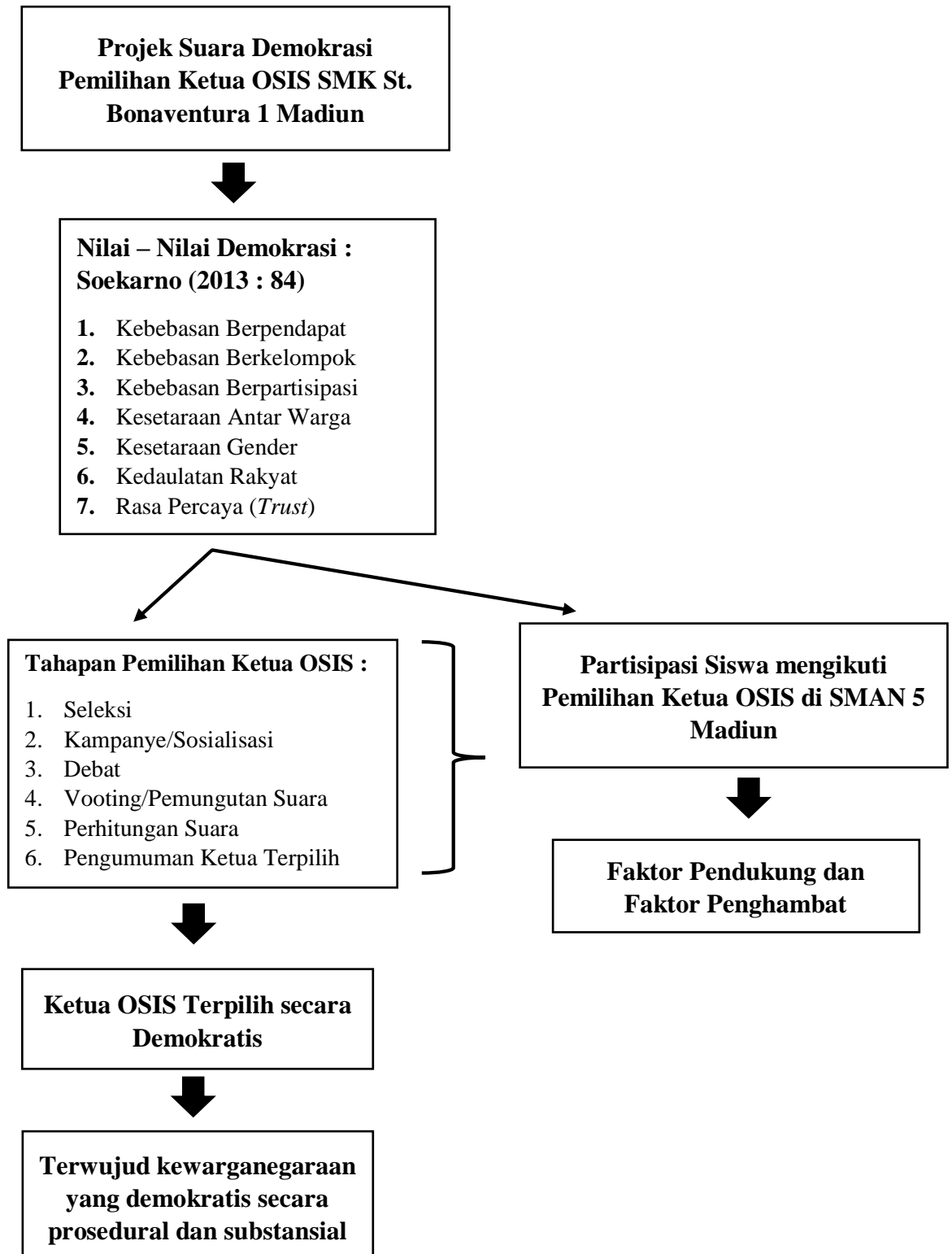
Berikut adalah penelitian yang relevan dan memiliki keterkaitan dalam kajian penelitian ini, diantaranya :

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Meidi (2013)	Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pengelolaan Kinerja OSIS SMA Negeri 3 Semarang	Kualitatif	Pada hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kinerja OSIS SMA Negeri 3 Semarang yang mengarah pada nilai-nilai demokrasi diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Para pengurus OSIS pada SMA Negeri 3 Semarang untuk melaksanakan fungsi manajemennya dalam mengelola kinerja sudah baik dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

				<p>Terdapat juga beberapa faktor penghambat diantaranya keterbatasan waktu dan pengalaman organisasi yang masih kurang.</p> <p>Untuk faktor pendukung yaitu keaktifan dari anggota-anggota OSISnya.</p>
2.	Reza (2016)	<p>Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Kegiatan Berorganisasi di Sekolah Pada Siswa Pengurus Osis Tahun 2015/2016</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil pada penelitian berisi mengenai sudah terlaksana dengan baik penerapan nilai-nilai demokrasi di sekolah. Selain itu hasil penelitian juga berisi konsep pendidikan demokrasi yang dilaksanakan dalam kurikulum pembinaan kesiswaan, hubungan bersama masyarakat serta melakukan simulasi demokrasi oleh siswa.</p>

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan beberapa definisi konseptual dan teori yang telah dibahas di atas, penelitian ini dapat diilustrasikan secara lebih rinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dengan contoh-contoh yang jelas sejauh mana temuan penelitian terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi melalui pelaksanaan proyek demokrasi untuk kelas OSIS di SMA St Bonaventura 1 Madiun.

Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori, nilai-nilai demokrasi tentunya dapat tumbuh dan berkembang dalam diri manusia apabila diimplementasikan dalam kehidupan, begitu pula pada siswa di SMK, tentunya materi mengenai demokrasi didapatkan melalui pembelajaran di kelas, sehingga diperlukan suatu wadah untuk mempraktekkan kegiatan tersebut, salah satunya adalah pemilihan ketua OSIS di sekolah masing-masing, namun pada pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa kendala seperti siswa kurang memahami bagaimana cara berdemokrasi dengan baik, minimnya partisipasi siswa dikarenakan minimnya sosialisasi dalam pemilihan ketua OSIS.

Bonaventura 1 Madiun mengusulkan solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di sekolah dengan menerapkan proses keanggotaan OSIS secara demokratis dengan menggunakan prosedur sidang umum sebagai model. Dengan mengikuti prosedur ini, para siswa dapat secara diam-diam mengembangkan sistem demokrasi yang siap untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat

mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk diri mereka sendiri yang pada akhirnya akan membantu mereka untuk mencapai tujuan proyek Pancasila.